

PERANCANGAN KANTOR DPRD DI PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM TUO NAGARI BALINGKA DENGAN PENDEKATAN COMFORTABLE PARLIEMENT

Khasih Qalbu Zakkiah¹

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Bung Hatta
khasih04@gmail.com

I Nengah Tela²

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Bung Hatta
nengahtela@bunghatta.ac.id

Al Busyra Fuadi³

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Bung Hatta
albusyrafuadi@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Proses pemekaran Kabupaten Agam menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo menimbulkan kebutuhan akan pusat pemerintahan baru yang mampu mewadahi aktivitas legislatif sekaligus menghadirkan pemerintahan representatif. Salah satu fasilitas utama yang dibutuhkan adalah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus pusat pelayanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi lapangan, studi pustaka, dan analisis tapak untuk merumuskan rancangan. Konsep yang diterapkan adalah *Comfortable Parliament*, yaitu pendekatan desain yang menekankan kenyamanan fungsional, psikologis, inklusivitas, serta identitas budaya. Hasil perancangan menunjukkan bahwa tata ruang kantor DPRD dapat diatur secara seimbang antara ruang publik, semi-publik, dan privat, sehingga mendukung transparansi, keamanan, dan interaksi masyarakat. Rancangan juga dilengkapi sarana representatif serta melibatkan unsur-unsur lokal Minangkabau pada fasad dan interior. Dengan demikian, desain kantor DPRD DOB Agam Tuo tidak hanya menjadi wadah kerja legislatif, tetapi juga simbol demokrasi daerah yang inklusif, produktif, dan berakar pada budaya lokal.

Kata Kunci: Kantor DPRD, Agam Tuo, Comfortable Parliament, Arsitektur, Pemekaran

ABSTRACT

The establishment of Agam Regency as a New Autonomous Region (DOB) known as Agam Tuo has created an urgent need for a new governmental center that adequately accommodates legislative functions and embodies representative governance. A key facility within this development is the Regional House of Representatives (DPRD) office, which is intended to function simultaneously as a legislative institution and as a public service hub. This study adopts a qualitative approach, employing field observations, literature review, and site analysis as the primary methods of inquiry. The design is guided by the *Comfortable Parliament* concept, which emphasizes functional efficiency, psychological comfort, inclusivity, and the integration of cultural identity. The findings indicate that the DPRD office can be spatially organized to achieve a balance between public, semi-public, and private areas, thereby enhancing transparency, security, and community engagement. Furthermore, the design incorporates representative facilities and integrates Minangkabau cultural elements within both the façade and the interior. Consequently, the proposed DPRD office is not only as a legislative workspace but also as a symbolic manifestation of regional democracy that is inclusive, sustainable, and firmly rooted in local cultural values.

Keywords: DPRD Office, Agam Tuo, Comfortable Parliament, Architecture, Regional Autonomy

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai otonomi daerah di Indonesia menjadi isu penting sejak era reformasi 1998, ketika sistem pemerintahan yang sebelumnya sentralistik digantikan dengan desentralisasi. Kebijakan pemekaran wilayah atau *Daerah Otonomi Baru* (DOB) muncul sebagai upaya negara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, rencana pembentukan Kabupaten Agam Tuo sebagai DOB di Sumatera Barat mencerminkan kebutuhan nyata akan pusat pemerintahan baru yang mampu menjalankan fungsi administratif sekaligus memperkuat representasi politik masyarakat setempat.

Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah melalui tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Keberadaan gedung DPRD bukan hanya sarana fisik untuk mendukung aktivitas kelembagaan, melainkan juga simbol representasi demokrasi. Dengan demikian, perencanaan kantor DPRD bagi Kabupaten Agam Tuo tidak semata-mata menyediakan ruang kerja administratif, tetapi juga harus mampu mewadahi interaksi publik, transparansi, serta mencerminkan identitas budaya lokal.

Kualitas ruang legislatif sangat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai kajian menekankan bahwa bangunan pemerintahan idealnya tidak hanya memenuhi aspek fungsional, tetapi juga harus mendukung keterbukaan, inklusivitas, serta menghadirkan representasi budaya masyarakat (Ahmad et al., 2020; Syahla, 2023). Dalam praktiknya, gedung DPRD berperan ganda: sebagai tempat pengambilan keputusan politik oleh para wakil rakyat dan sebagai ruang publik di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, rancangan kantor DPRD Agam Tuo harus mengintegrasikan fungsi legislatif dengan peran sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Comfortable Parliament*, sebuah pendekatan perancangan yang menekankan kenyamanan fungsional, kenyamanan psikologis, inklusivitas, serta integrasi identitas budaya. Pendekatan ini berbeda dari desain perkantoran konvensional karena menempatkan kenyamanan dan interaksi publik sebagai bagian integral dari produktivitas lembaga legislatif. Integrasi nilai budaya Minangkabau juga menjadi aspek penting, mengingat budaya tersebut memiliki makna simbolis dan identitas kuat dalam konteks sosial masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan rancangan arsitektur kantor DPRD Agam Tuo yang responsif terhadap kebutuhan administrasi, mendorong partisipasi publik, serta menampilkan citra representatif dari demokrasi lokal. Dengan menekankan organisasi ruang, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian budaya, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada wacana akademik mengenai bagaimana arsitektur dapat berperan sebagai fasilitator tata kelola pemerintahan pada daerah otonomi baru di Indonesia.

LITERATUR

1. Pusat Pemerintahan dan Daerah Otonomi Baru (DOB)

Pusat pemerintahan memiliki makna strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga mencerminkan nilai filosofis, fungsional, teknis, dan monumental suatu daerah. Dalam konteks pemekaran wilayah, pusat pemerintahan baru diperlukan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta memperkuat legitimasi daerah yang baru terbentuk (Masterplan Pusat Perkantoran, n.d.). Hal ini sejalan dengan kebutuhan Kabupaten Agam Tuo sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang harus memiliki infrastruktur pemerintahan representatif, termasuk gedung DPRD, agar mampu mewadahi aktivitas kelembagaan sekaligus menjadi simbol identitas daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga legislatif yang menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi ini menjadikan DPRD sebagai salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Literatur menegaskan bahwa keberadaan gedung DPRD bukan sekadar sarana fisik, melainkan juga simbol representasi demokrasi yang menuntut rancangan arsitektur transparan, inklusif, dan mampu mewadahi interaksi antara wakil rakyat dengan masyarakat (Ode et al., 2020). Dengan demikian, desain gedung DPRD harus mengakomodasi ruang formal untuk pengambilan keputusan sekaligus ruang publik yang mencerminkan prinsip keterbukaan.

3. Kantor

Kata "kantor" berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu lokasi yang biasanya digunakan untuk tempat usaha atau perusahaan. Kantor bisa berupa ruangan, ruangan kecil, atau gedung bertingkat. Menurut Long (2004), Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut "kantor" sebagai tempat perginya orang-orang untuk mengawasi pekerjaannya, atau dapat juga disebut dengan lokasi "bekerja". Menurut ahli, kantor dapat diartikan sebagai suatu tempat yang biasa digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif. Menurut Prajudi Atmosudirjo

(1982:25), jabatan adalah suatu struktur organisasi yang terdiri atas personel, tempat, dan operasional administrasi untuk menunjang usaha.

4. Fungsi Kantor, Organisasi Ruang, dan Sirkulasi

Kantor pada dasarnya berfungsi sebagai tempat mengelola informasi, melakukan koordinasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas fungsi ini sangat dipengaruhi oleh organisasi ruang dan pola sirkulasi. Literatur menjelaskan bahwa pembagian zona publik, semi publik, dan privat harus dirancang dengan proporsi yang seimbang agar aktivitas internal tidak terganggu, sekaligus tetap memberikan ruang partisipasi masyarakat (Marina Bay Sands, n.d.). Dengan pengaturan ruang yang tepat, alur pergerakan pengguna akan lebih efisien, baik bagi anggota DPRD, staf sekretariat, maupun masyarakat yang berkepentingan.

5. Regulasi Teknis Bangunan Negara

Sebagai bangunan pemerintahan, rancangan kantor DPRD harus mematuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Permen PUPR No. 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara menjadi acuan utama dalam aspek teknis, meliputi tata ruang, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, serta keberlanjutan (Permen PUPR, 2018). Regulasi ini memastikan bahwa gedung pemerintahan tidak hanya memenuhi aspek estetika dan simbolik, tetapi juga layak secara teknis, fungsional, dan legal.

6. Tema dan Pendekatan Desain

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama dalam perancangan:

- Comfortable Parliament → pendekatan desain yang menekankan kenyamanan fungsional, kenyamanan psikologis, dan inklusivitas. Konsep ini relevan karena ruang legislatif harus mampu mendukung produktivitas kerja sekaligus memberikan rasa nyaman bagi anggota dewan maupun masyarakat (Wardana et al., 2021).
- Sense of Place → pendekatan yang mengintegrasikan identitas lokal dalam arsitektur. Dalam konteks Sumatera Barat, pendekatan ini diwujudkan melalui penerapan atap gonjong serta ornamen ukiran tradisional Minangkabau seperti *Kaluak Paku* dan *Itiak Pulang Patang*, yang dipadukan dengan elemen modern sehingga menghasilkan citra arsitektur pemerintahan yang kontekstual dan bermakna (Velia, 2020; Syaputra, 2021).

7. Tinjauan Jurnal dan Preseden

Literatur jurnal menegaskan bahwa kualitas tata ruang legislatif berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja dan kenyamanan psikologis penggunanya. Penelitian Wardana et al. (2021) menekankan pentingnya pencahayaan alami dan tata ruang ergonomis, sementara Syahla (2023) menyoroti pengaruh kenyamanan psikologis terhadap produktivitas lembaga legislatif. Kajian lain juga menunjukkan bahwa integrasi budaya lokal dapat memperkuat identitas bangunan pemerintahan serta meningkatkan kedekatan emosional masyarakat terhadap lembaga publik (Jurnal *Creating Comfortable Working Conditions for Computer Workers*, n.d.; Jurnal *Analisis Tata Ruang dalam Kenyamanan Kerja*, n.d.). Selain itu, studi

preseden nasional maupun internasional memberikan gambaran mengenai bagaimana bangunan legislatif dapat dirancang dengan prinsip transparansi, inklusivitas, dan keberlanjutan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perancangan Kantor DPRD Agam Tuo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan merumuskan konsep perancangan arsitektur Kantor DPRD Kabupaten Agam Tuo. Pendekatan ini dipilih karena perancangan arsitektur tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan psikologis pengguna.

Adapun tahapan metode penelitian meliputi:

1. Pengumpulan Data

- **Data primer** diperoleh melalui observasi langsung ke Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, serta dokumentasi kondisi fisik tapak (topografi, iklim, sirkulasi, dan utilitas).
- **Data sekunder** diperoleh dari studi literatur, kajian peraturan pemerintah (Permen PU No. 22 Tahun 2018), serta analisis preseden gedung pemerintahan baik nasional maupun internasional.

2. Teknik Analisis

- **Analisis tapak:** mencakup aspek aksesibilitas, kondisi iklim, kebisingan, utilitas, serta hubungan dengan lingkungan sekitar.
- **Analisis kebutuhan ruang:** mengidentifikasi fungsi dan aktivitas DPRD, termasuk ruang kerja legislatif, ruang rapat, ruang, serta fasilitas pendukung.
- **Analisis organisasi ruang:** penyusunan zonasi legislatif, semi publik, dan privat yang seimbang sesuai fungsi legislatif dan pelayanan legislatif.

3. Perumusan Konsep

Hasil analisis digunakan untuk merumuskan konsep desain *Comfortable Parliament* yang menekankan kenyamanan fungsional, psikologis, inklusivitas, serta integrasi budaya Minangkabau.

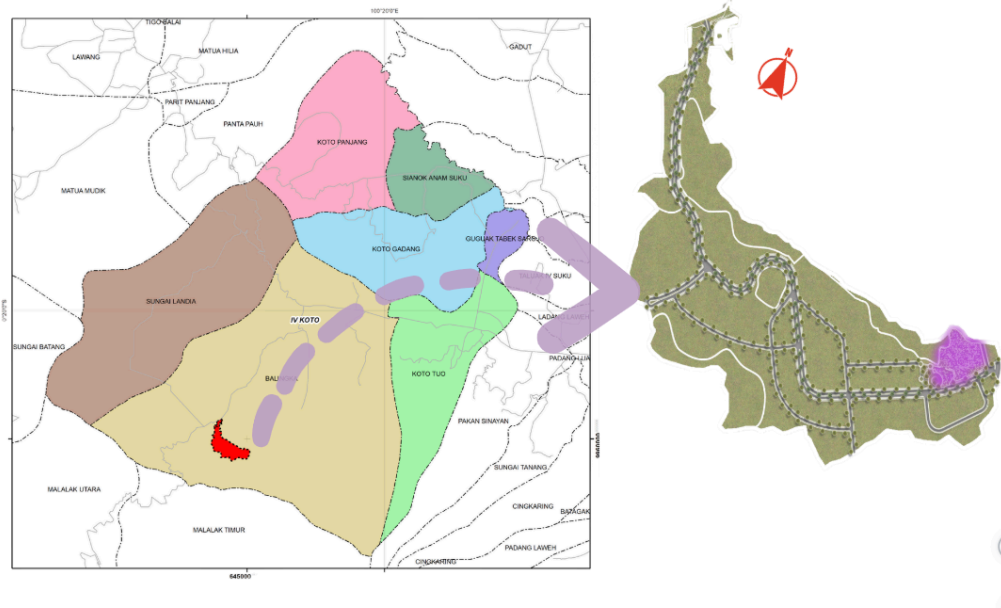
4. Perancangan

Tahap akhir dari penyusunan rancangan arsitektur berupa masterplan, site plan, serta skema tata ruang dan massa bangunan DPRD DOB Agam Tuo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi

Pusat pemerintahan Kabupaten Agam Tuo ditempatkan di Kecamatan IV Koto, tepatnya di Jl. Lintas Sicincin, Malalak, dan Balingka. Lokasi ini dipilih karena posisi geografis lokasinya yang sentral dan mudah diakses untuk melayani semua kecamatan yang termasuk dalam cakupan daerah otonomi baru (DOB) .



Gambar 1 Peta Administratif Agam
(sumber :PUTR Agam)

Pemekaran DOB kabupaten Agam tuo meliputi 10 kecamatan :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Tilantang Kamang | 7. Palupuah |
| 2. Baso | 8. Malalak |
| 3. Canduang | 9. IVKoto |
| 4. Sungai Pua | 10. Kamang Magek |
| 5. Ampek Angkek | |
| 6. Banuhampu | |

Site

Luas tapak untuk perancangan kantor DPRD **12906,5m²** dengan pembagian dan Batasan Site sebagai berikut :

Barat : Alun - Alun

Utara : Hutan

Timur : Rumah Dinas

Selatan : Kantor Bupati



Gambar 2 Site

- **Luas Kantor DPRD**

$$\text{KDB} = 60 \% \times 10623,5 \text{ M}^2 = 6374,1 \text{ M}^2.$$

$$= 1.8 \times 10623,5 \text{ M}^2: 6374,1 \text{ M}^2$$

$$\text{KDH} = 40\% \times 10623,5 \text{ M}^2 = 4.249,4 \text{ M}^2$$

$$= 3 \text{ LANTAI (MAX)}$$

$$\text{KLB} = 1.8 \times \text{LUAS SITE: KDB}$$

- **Luas Convention**

$$\text{KDB} = 60 \% \times 2.283 \text{ M}^2$$

$$\text{KLB} = 1.8 \times \text{LUAS SITE : KDB}$$

$$= 1.369 \text{ M}^2$$

$$= 1.8 \times 7274 \text{ M}^2: 4.364 \text{ M}^2$$

$$\text{KDH} = 40\% \times 2.283 \text{ M}^2$$

$$= 3 \text{ LANTAI (MAX)}$$

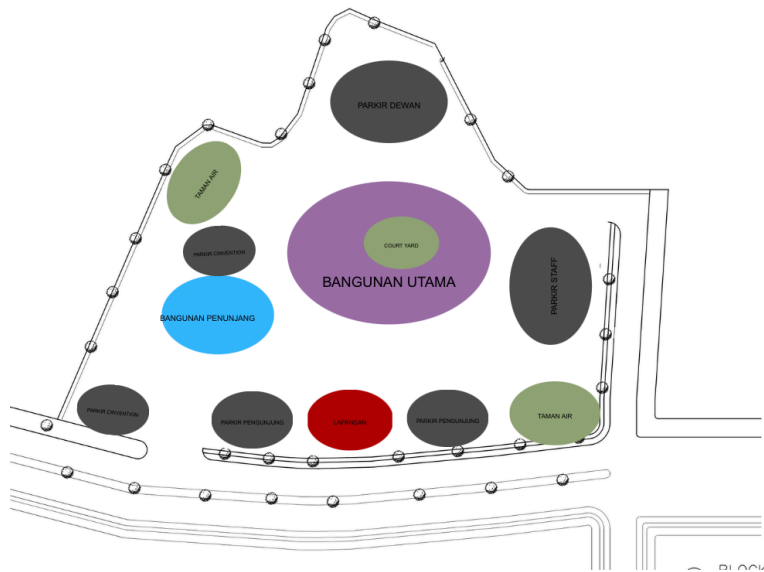
$$= 913 \text{ M}^2$$

KONSEP

Zoning Makro

Zoning Kantor DPRD Agam Tuo

Zoning merupakan pembagian fungsi kawasan secara umum untuk mengatur hubungan antara bangunan utama, fasilitas pendukung, dan ruang publik. Pada perencanaan Kantor DPRD DOB Agam Tuo, zoning dibagi menjadi:



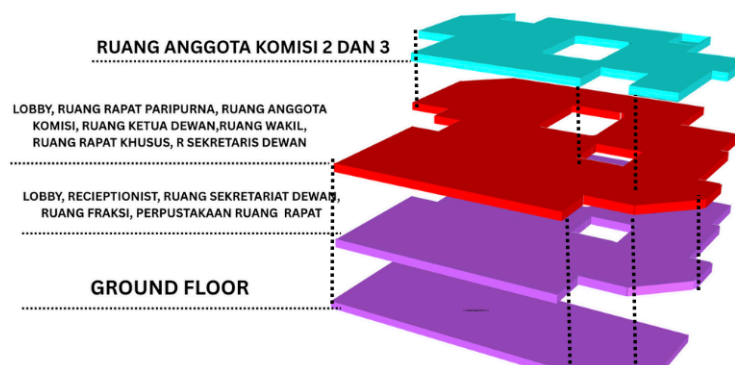
Gambar 3 Zoning Makro

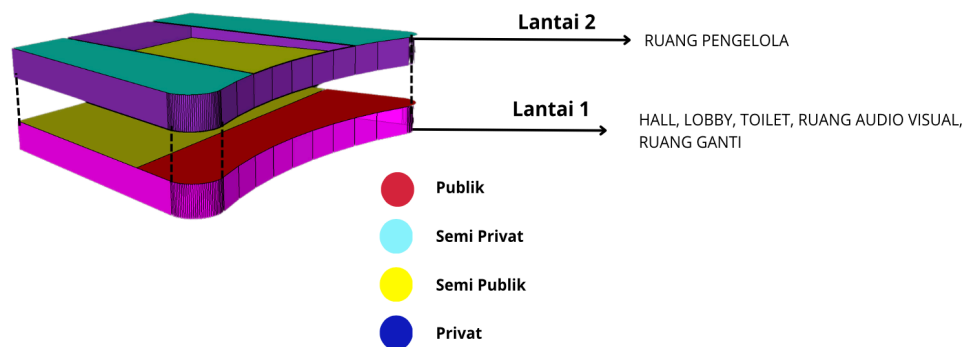
1. Zona Utama → gedung DPRD sebagai pusat kegiatan legislatif (rapat paripurna, komisi, fraksi, pimpinan).
2. Zona Pendukung → fasilitas penunjang seperti convention center, kantin, musholla, dan parkir pengelola.
3. Zona Publik → area interaksi legislatif, taman, jalur pedestrian, dan parkir pengunjung.
4. Zona Teknis/Utilitas → area servis: instalasi, air bersih/kotor, limbah, dan parkir servis.

Prinsip perancangannya menekankan aksesibilitas yang jelas, transparansi, serta keberlanjutan dengan ruang terbuka hijau.

Zoning Mikro

Zoning mikro pada Gedung DPRD Kabupaten Agam Tuo difokuskan pada organisasi ruang dalam bangunan yang disusun berdasarkan fungsi, tingkat aksesibilitas, dan hierarki kelembagaan. Pada lantai dasar ditempatkan zona publik yang terdiri atas lobi, resepsionis, ruang tunggu, atrium, dan ruang rapat paripurna. Penempatan zona ini pada area yang paling mudah diakses mencerminkan prinsip transparansi serta keterbukaan DPRD terhadap masyarakat.





Gambar 4 Zoning Mikro

(sumber: Analisa Penulis 2025)

Lantai menengah difungsikan sebagai zona semi publik, meliputi ruang fraksi, ruang rapat komisi, serta ruang kerja staf. Zona ini menjadi ruang transisi antara aktivitas legislatif dan administratif, dengan sirkulasi yang lebih terkontrol untuk membatasi akses masyarakat umum.

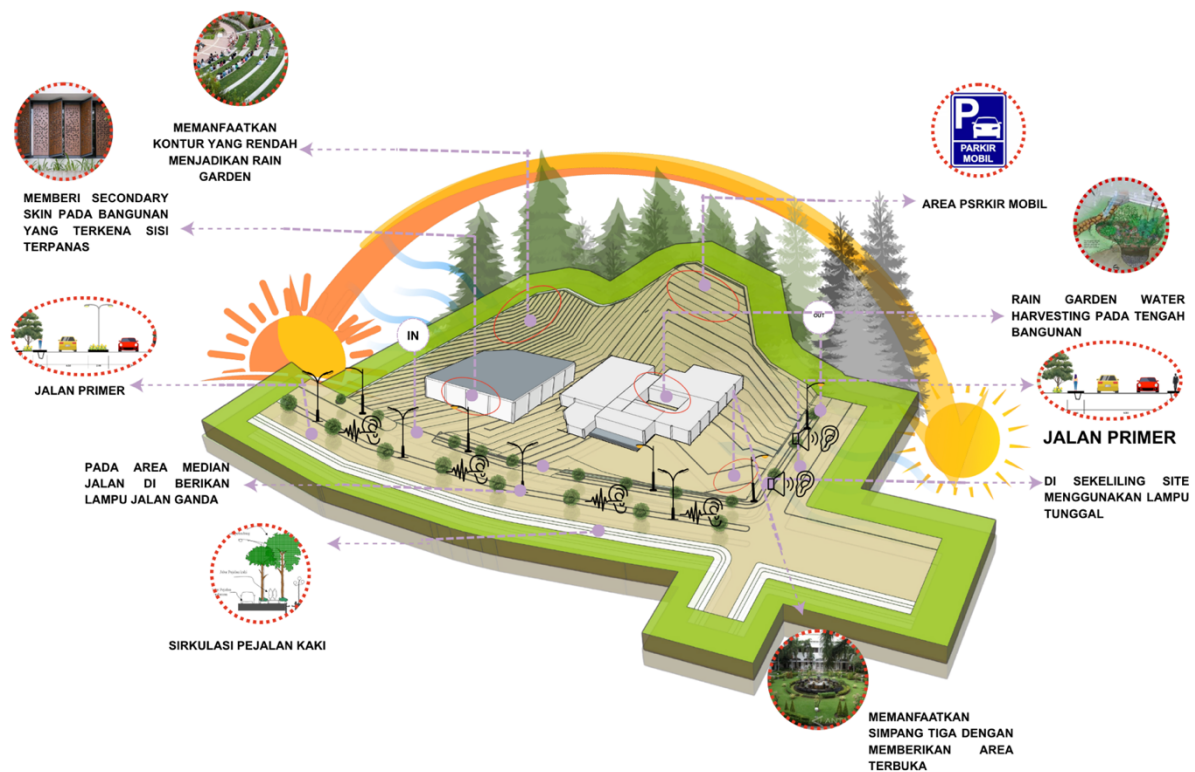
Adapun zona privat ditempatkan pada lantai atas, mencakup ruang pimpinan dewan, ruang istirahat, dan ruang penunjang lain yang menuntut privasi tinggi. Pola hierarki vertikal ini menegaskan struktur organisasi kelembagaan, sekaligus mendukung kenyamanan kerja pimpinan.

Selain itu, disediakan pula zona penunjang seperti mushola, kantin, toilet, dan ruang servis yang tersebar di setiap lantai untuk menjamin kelancaran operasional bangunan.

Dengan pembagian tersebut, zoning mikro berhasil menghadirkan struktur ruang yang terorganisir, sirkulasi yang jelas, dan hierarki fungsi yang tegas, sejalan dengan pendekatan *Comfortable Parliament* yang menekankan kenyamanan, inklusivitas, serta produktivitas ruang legislatif.

Konsep Tapak dan Lingkungan

Perancangan Gedung DPRD Kabupaten Agam Tuo didasarkan pada analisis tapak yang mempertimbangkan orientasi matahari, arah angin, topografi, dan aksesibilitas. Kawasan ditata melalui pembagian zona publik di bagian depan, semi publik di tengah, serta privat dan servis di bagian belakang untuk menjamin keteraturan fungsi dan sirkulasi. Lingkungan diperkuat dengan ruang terbuka hijau dan taman atap yang berperan sebagai elemen ekologis sekaligus ruang rekreatif, sehingga meningkatkan kenyamanan termal dan kualitas visual. Dengan demikian, konsep tapak dan lingkungan tidak hanya mendukung fungsi kelembagaan DPRD, tetapi juga mencerminkan prinsip **representatif, kontekstual, dan berkelanjutan** sesuai pendekatan *Comfortable Parliament*.



Gambar 5 Superimpose

(sumber: Analisa Penulis 2025)

Gambar Superimpose menunjukkan rancangan tapak perencanaan Kantor DPRD Kabupaten Agam Tuo dengan memperhatikan kondisi kontur, orientasi matahari, aksesibilitas, dan pengelolaan lingkungan. Beberapa poin penting:

1. Pemanfaatan Kontur

- Kontur rendah dimanfaatkan sebagai area rain garden untuk menampung air hujan dan mengurangi limpasan permukaan.
- Penataan bangunan mengikuti kontur tapak sehingga lebih harmonis dengan kondisi alami dan meminimalkan cut and fill.

2. Pengendalian Iklim dan Orientasi

- Bangunan diberi secondary skin pada sisi yang terkena panas matahari berlebih untuk menjaga kenyamanan termal.
- Pencahayaan alami tetap dioptimalkan melalui orientasi dan bukaan bangunan.

3. Aksesibilitas dan Sirkulasi

- Jalan primer menghubungkan pintu masuk tapak dengan area utama.
- Sirkulasi pejalan kaki disediakan untuk mendukung akses ramah pejalan.

- Area parkir mobil ditempatkan di sisi luar tapak untuk memisahkan kendaraan dari zona inti.

4. Utilitas dan Pencahayaan Jalan

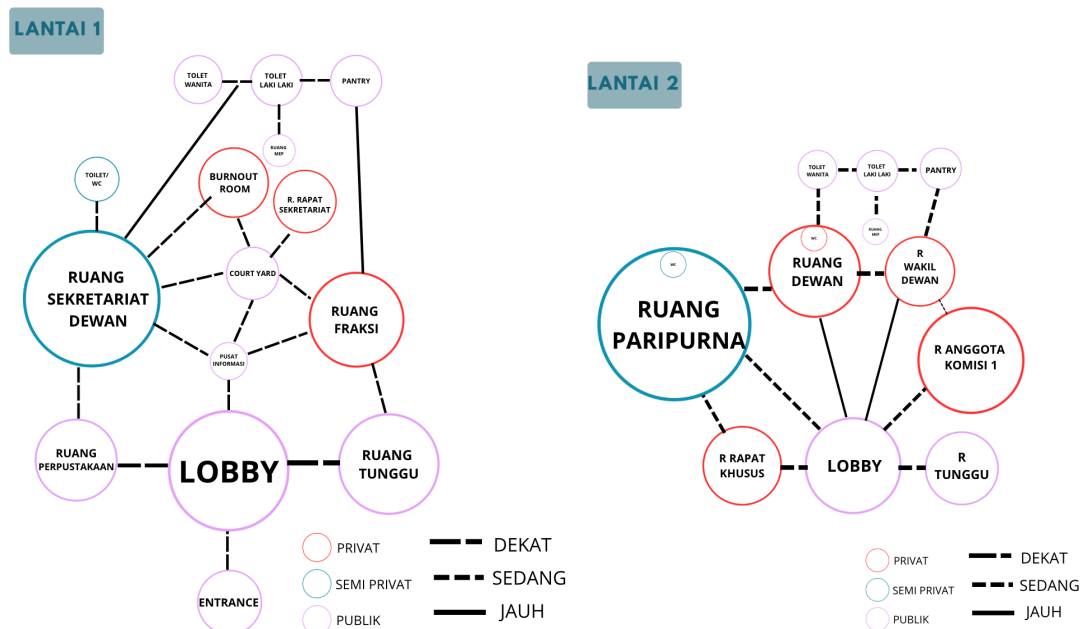
- Median jalan dilengkapi lampu ganda, sedangkan sirkulasi di sekeliling site memakai lampu, guna efisiensi energi.
- Sistem water harvesting ditempatkan di bangunan sebagai keberlanjutan.

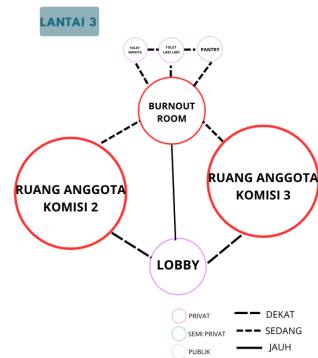
5. Pemanfaatan Ruang Terbuka

- Area terbuka ditempatkan pada simpang tiga di depan tapak untuk memberi ruang hijau sekaligus sebagai buffer dan elemen estetis.

Konsep Ruang Dalam

Analisis ruang dalam pada perancangan Kantor DPRD Kabupaten Agam Tuo dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi kelembagaan, kebutuhan pengguna, serta prinsip keterbukaan legislatif. Secara umum, pembagian ruang mengikuti hierarki aktivitas, yaitu: ruang publik, semi publik, dan privat. Ruang publik mencakup area resepsionis, lobi, atrium, serta ruang rapat paripurna yang menjadi pusat interaksi masyarakat dengan anggota dewan. Zona semi publik meliputi ruang fraksi, ruang rapat komisi, serta ruang kerja staf yang berfungsi sebagai penghubung antara aktivitas legislatif dan administratif. Sementara itu, ruang privat ditempatkan untuk kebutuhan pimpinan dewan, ruang istirahat, dan area penunjang yang membutuhkan tingkat privasi tinggi.





Gambar 6 Organisasi Ruang

(sumber: Analisa Penulis 2025)

Konsep menekankan kenyamanan fungsional dan psikologis sesuai pendekatan *Comfortable Parliament*. Tata letak ruang dirancang agar pergerakan sirkulasi jelas, dengan akses publik dan privat yang dipisahkan namun tetap terkoneksi melalui jalur sirkulasi utama. Pencahayaan alami melalui void atrium dan bukaan kaca besar dimanfaatkan untuk menghadirkan suasana interior yang terang, sehat, dan hemat energi. Pada saat yang sama, elemen budaya lokal dimasukkan ke dalam interior melalui ornamen ukiran Minangkabau dan penggunaan material kayu yang memberi nuansa hangat serta memperkuat identitas ruang.

Siteplan

Site plan merupakan representasi pengembangan integrasi antara konsep ruang luar dengan konteks ruang alam. Dokumen ini menampilkan keterhubungan serta pengaturan posisi ruang dalam terhadap ruang luar, sehingga dapat dinilai tingkat sinkronisasinya. Perancangan site plan kawasan pusat pemerintahan di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Tuo, disusun dengan mempertimbangkan prinsip fungsi, aksesibilitas, kenyamanan, serta penginternalisasian filosofi budaya lokal dalam tata ruang kawasan.



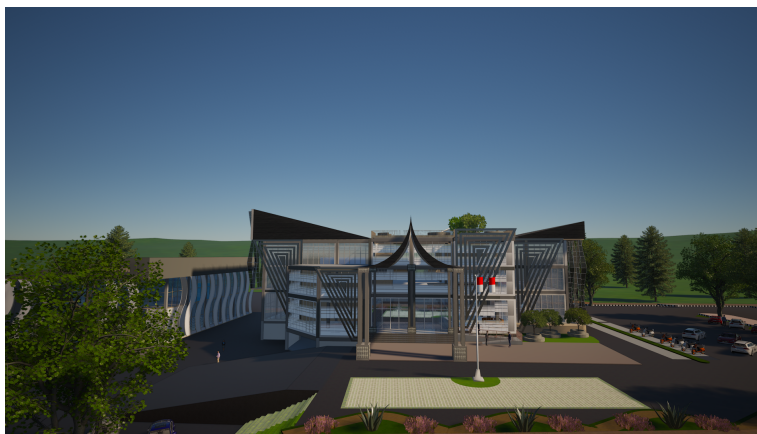
Gambar 7 Siteplan

(sumber: Analisa Penulis 2025)

Konsep kawasan pada perancangan Gedung DPRD Kabupaten Agam Tuo menekankan prinsip integrasi fungsi pemerintahan dengan konteks lingkungan sekitar, melalui pengaturan zoning makro yang membagi area menjadi zona publik, semi publik, privat, serta penunjang. Siteplan dirancang responsif terhadap kontur tapak, orientasi matahari, dan sirkulasi, sehingga tercipta tatanan kawasan yang teratur, efisien, dan representatif.

Fasad Bangunan

Fasad bangunan Kantor DPRD Kabupaten Agam Tuo dirancang sebagai representasi identitas yang dipadukan dengan pendekatan modern. Elemen utama fasad menampilkan transformasi bentuk ukiran Minangkabau, khususnya motif *Kaluak Paku*, yang diterapkan pada secondary skin. Elemen ini berfungsi ganda, yaitu sebagai peneduh dari sinar matahari langsung sekaligus sebagai keterikatan budaya.



Gambar 8 Prespektif

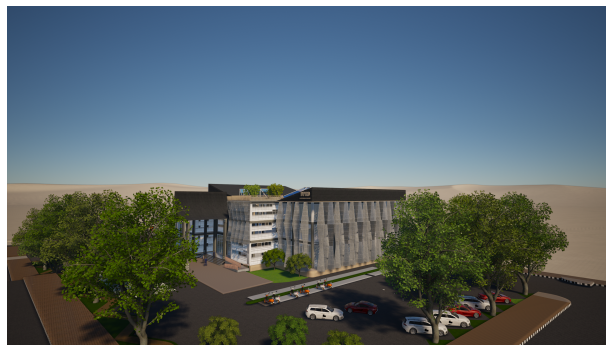
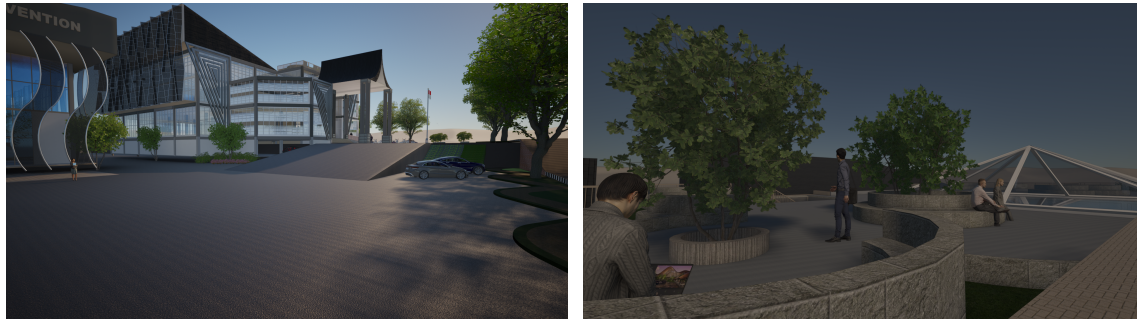
(sumber: Analisa Penulis 2025)

Pada bagian atap, digunakan bentuk gonjong yang merupakan ciri khas arsitektur rumah gadang Minangkabau. Gonjong ini tidak hanya bernilai simbolik, tetapi juga mempertegas kewibawaan serta memperkuat citra bangunan sebagai pusat pemerintahan baru. Transparansi diwujudkan melalui penggunaan kaca yang luas, menghadirkan Kesan modern sekaligus mencerminkan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam Lembaga DPRD.

Konsep fasad ini sejalan dengan pendekatan *Comfortable Parliament*, karena menghadirkan kenyamanan termal melalui secondary skin, keterbukaan visual melalui material kaca, serta identitas kultural melalui elemen arsitektural. Dengan demikian, fasad tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dan elemen estetis, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang nyaman, inklusif, dan representatif bagi Lembaga legislatif daerah.

Eksterior

Perancangan Kantor DPRD Kabupaten Agam Tuo menerapkan beberapa prinsip desain utama yang mendukung fungsi legislatif sekaligus mencerminkan identitas daerah: Eksterior Gedung DPRD Kabupaten Agam Tuo dirancang dengan pendekatan yang menggabungkan modernitas dan kearifan lokal Minangkabau.



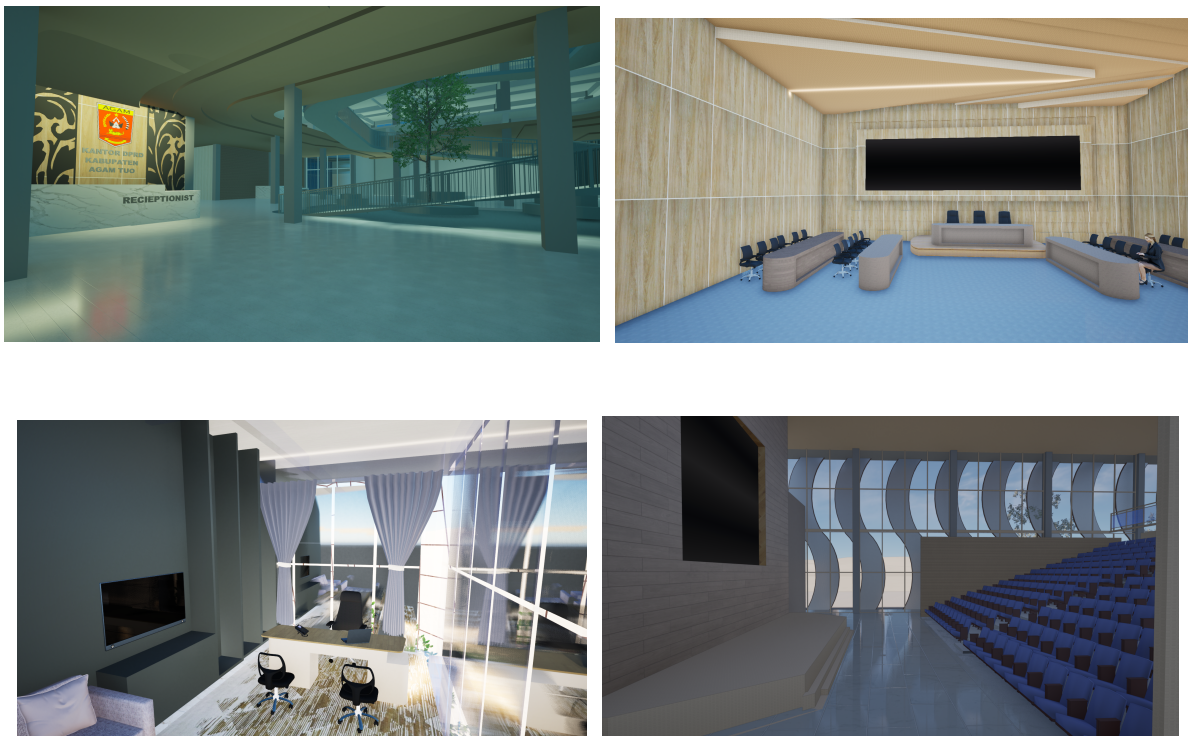
Gambar 9 Prespektif Eksterior Bangunan

(sumber: Analisa Penulis 2025)

- **Keteraturan dan Simetri**
 - Massa bangunan disusun secara simetris untuk menciptakan kesan formal, monumental, dan representatif sesuai fungsi lembaga pemerintahan.
- **Identitas Lokal**
 - Penggunaan atap gonjong serta secondary skin bermotif ukiran Minangkabau menghadirkan citra arsitektur yang berakar pada budaya lokal, sekaligus memperkuat *sense of place*.
- **Kenyamanan (Comfortable Parliament)**
 - Fasad dengan secondary skin berfungsi sebagai pengendali iklim, sementara bukaan kaca luas menghadirkan pencahayaan alami dan kesan transparan yang mendukung kenyamanan kerja.
- **Keterbukaan dan Transparansi**
 - Material kaca digunakan untuk memberi kesan modern dan terbuka, melambangkan prinsip demokrasi dan aksesibilitas publik terhadap lembaga DPRD.
- **Keberlanjutan**
 - Elemen hijau seperti taman rooftop dan ruang terbuka di depan berperan dalam mengurangi panas berlebih, meningkatkan kualitas udara, serta menyediakan ruang interaksi publik yang inklusif.

Interior

Interior bangunan menekankan pada konsep kenyamanan fungsional, psikologis, dan representatif, sesuai dengan pendekatan *Comfortable Parliament*. Pada area publik, lobi dan atrium dirancang dengan void besar untuk menghadirkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang baik, dilengkapi elemen hijau seperti pohon indoor untuk menambah suasana alami. Ruang rapat paripurna ditata dengan kursi berjenjang agar seluruh anggota dewan memiliki visibilitas optimal, didukung teknologi audiovisual untuk kelancaran sidang. Ruang kerja fraksi dan komisi ditempatkan pada zona semi publik dengan tata letak fleksibel untuk mendukung diskusi. Sementara itu, ruang pimpinan dewan dan ruang istirahat ditempatkan di zona privat dengan material kayu dan pencahayaan lembut yang menekankan suasana formal namun tetap nyaman. Ornamen Minangkabau pada dinding dan furnitur menjadi aksen interior yang memperkuat identitas lokal.



Gambar 10 Prespektif Interior Bangunan

(sumber: Analisa Penulis 2025)

Prinsip Desain Interior Bangunan

- **Keterbukaan dan Transparansi**
 - Penggunaan void dan atrium terbuka pada area resepsionis menciptakan sirkulasi udara serta pencahayaan alami yang optimal.
 - Ruang kerja pimpinan menggunakan kaca besar dengan tirai fleksibel untuk menghadirkan kesan terbuka sekaligus menjaga privasi.
- **Identitas Lokal**
 - Ornamen ukiran Minangkabau diaplikasikan pada dinding resepsionis sebagai elemen

dekoratif yang memperkuat identitas budaya lokal.

– Pemilihan material kayu pada ruang rapat paripurna menghadirkan nuansa hangat sekaligus representatif.

- **Kenyamanan dan Ergonomi**

– Ruang rapat paripurna menggunakan tata letak kursi dan meja ergonomis dengan jarak pandang jelas ke layar utama, mendukung komunikasi efektif.

– Ruang kerja pimpinan dilengkapi dengan furnitur sederhana namun fungsional, mendukung suasana kerja yang nyaman dan produktif.

- **Integrasi Alam dan Psikologis**

– Kehadiran pohon di atrium menambah elemen alami, menciptakan keseimbangan visual serta efek psikologis yang menenangkan.

– Pencahayaan alami dipadukan dengan pencahayaan buatan yang lembut untuk menciptakan suasana interior yang kondusif.

KESIMPULAN

Perancangan Kantor DPRD Kabupaten Agam Tuo dengan pendekatan *Comfortable Parliament* menunjukkan bahwa arsitektur lembaga legislatif pada daerah otonomi baru tidak hanya berfungsi sebagai ruang kerja administratif, tetapi juga sebagai simbol representasi demokrasi yang inklusif dan berakar pada budaya lokal. Melalui metode kualitatif yang melibatkan observasi lapangan, studi literatur, dan analisis preseden, rancangan ini mampu menjawab tantangan konteks tapak di Nagari Balingka yang memiliki kondisi geografis, iklim, dan sosial yang khas.

Hasil perancangan menegaskan pentingnya organisasi ruang yang seimbang antara zona publik, semi-publik, dan privat, sehingga aktivitas legislatif dapat berlangsung efektif sekaligus menjaga keterbukaan terhadap masyarakat. Zoning makro dan mikro yang diterapkan menghasilkan pemisahan fungsi yang jelas tanpa menghilangkan potensi interaksi publik, sementara rancangan tapak yang memperhatikan kontur, sirkulasi, serta ruang terbuka hijau menunjukkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan.

Pada aspek bentuk dan fasad, bangunan menggabungkan geometri modern yang formal dengan elemen organik dan simbolik dari budaya Minangkabau, seperti atap gonjong dan motif ukiran *Kaluak Paku* pada secondary skin. Integrasi ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menghadirkan kenyamanan termal dan kesan representatif. Prinsip kenyamanan juga diinternalisasikan dalam desain interior melalui pencahayaan alami, tata ruang ergonomis, serta kehadiran elemen alami seperti atrium hijau dan taman rooftop yang mendukung kesehatan psikologis pengguna.

Secara keseluruhan, rancangan Kantor DPRD Agam Tuo mencerminkan lima prinsip utama: keteraturan dan simetri, identitas lokal, kenyamanan, keterbukaan, dan keberlanjutan. Penerapan prinsip tersebut membuktikan bahwa arsitektur pemerintahan dapat berperan sebagai fasilitator tata kelola demokrasi lokal dengan menghadirkan ruang kerja yang nyaman, transparan, inklusif, serta responsif terhadap lingkungan dan budaya. Dengan demikian, perancangan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan DOB Agam Tuo terhadap infrastruktur pemerintahan, tetapi juga menjadi model konseptual bagi pengembangan gedung legislatif di daerah otonomi baru lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSAKA

- Ahmad, R., & Nurdin, M. (2020). *Arsitektur Pemerintahan dan Representasi Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Arsitektur dan Perkotaan, 12(2), 145–158. <https://doi.org/10.24821/jap.v12i2>.
- Marina Bay Sands. (n.d.). *Convention and Exhibition Center Design*. Retrieved from <http://www.marinabaysands.com>
- Ode, D., Dzuliyani, M., & Raharjo, T. (2020). *Legislative Organization and Its Role in Regional Autonomy*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 101–115.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara*. Jakarta: Kementerian PUPR. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111365/permen-pupr-no-22prtm2018>
- Putri, M., & Rahman, T. (2021). *Cultural Identity Integration in Government Architecture in West Sumatra*. Jurnal Arsitektur Nusantara, 9(3), 201–212.
- Syahla, N. (2023). *Psychological Comfort in Legislative Spaces: Interior Design Approaches in Regional DPRD Buildings*. Jurnal Desain Interior, 8(1), 33–45.
- Syaputra, F. (2021). *Perencanaan Kantor Dinas Sosial dengan Pendekatan Arsitektur Regionalisme di Kota Padang Panjang*. Skripsi, Universitas Bung Hatta.
- Velia, G. (2020). *Perancangan Kantor Pemerintah dengan Pendekatan Sense of Place*. Skripsi, Universitas Ciputra. https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/6511/35-39%2Bvelia_rev%2B3.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Wardana, J. E., Dewi, O. C., & Sari, J. S. (2021). *Comfortable Room Condition for Working and Resting*. Journal of Architectural Design and Urbanism, 3(1), 59–71. <https://doi.org/10.37275/jadu.v3i1>.
- Yuliani, S. (2020). *Sustainable Design Principles in Governmental Buildings*. Jurnal Arsitektur Hijau, 5(2), 87–99.